

PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-07

BALIKPAPAN NOMOR :05-K/PM I-07/AD/I/2012.

Peradilan Militer baru dibentuk setelah dikeluarkannya UU. No. 7 tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara disamping pengadilan biasa, pada tanggal 8 Juni 1946, kurang lebih 8 bulan setelah lahirnya Angkatan Bersenjata RI. Dalam masa kekosongan hukum ini, diterapkan hukum disiplin militer.

Dengan dikeluarkannya kedua undang-undang di atas, maka peraturan-peraturan di bidang peradilan militer yang ada pada zaman sebelum proklamasi, secara formil dan materil tidak diperlakukan lagi.

1. Mahkamah Tentara
2. Mahkamah Tentara Agung.

1. Prajurit Tentara (AD) RI, Angkatan laut dan Angkatan Udara

Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terdiri dari:

- [illegible]

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berkendara sepeda motor sekira pukul 02.15 WITA hari Minggu tanggal 2 Oktober 2011 Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Tentara untuk menunggu anak Terdakwa a.n. Sdri Marini Dwi Astuti yang sakit karena kecelakaan lalu lintas.

- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali ke Bontang, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 Terdakwa melaksanakan dinas dalam (Piket) di Koramil 0908-01/Kota selanjutnya turun piket pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju Hotel CB untuk mengantarkan 2 (dua) Poket shabu-shabu beserta bong dan sedotan pesanan Sdri Memei, kemudian sekitar pukul 14.15 Terdakwa tiba di halaman depan parkir Hotel CB di Jalan Letnan Jenderal S. Parman Nomor 02 Rt 08 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat.
- e. Bahwa di halaman depan parkir Hotel CB tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh Briptu Kristian Saman (Saksi-2) dan Aipda Marten Lalo bersama 5 (lima) anggota Satres narkoba lainnya, selanjutnya Briptu Hamsir Saksi-1 membawa Terdakwa kedalam lobi hotel dan langsung melakukan penggeledahan badan.

f. Bahwa dari hasil penggeledahan badan Terdakwa disita tas warna biru bermerk Texas Chicken yang masih dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkannya, selanjutnya Saksi-1 melakukan pemeriksaan didalam tas tersebut lalu ditemukan barang berupa:

- 2 (dua) poket shabu-shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap/bong.
- 2 (dua) korek api gas.
- 2 (dua) potong sedotan berwarna putih.
- 1 (satu) lembar plastik berperekat.
- 1 (satu) buah potongan sedotan.

g. Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan yang diketahui memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu tersebut tidak dapat menunjukkan surat-surat dari pihak yang berwajib.

h. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011 Instalasi Laboratorium rumah sakit Taman Husada atas permohonan Kaurbinops a.n Kapolres Bontang telah melakukan pemeriksaan/ tes terhadap urine Terdakwa yang hasilnya diketahui positif mengandung amphetamine dan methampemin, Terdakwa mengaku telah menggunakan shabu-shabu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr Iwan dan Sdri Memei (kekasih Sdr Iwan) di rumah Iwan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 pukul 21.00 WITA.

- Karena dalam menentukan suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau tidak dalam tingkat penyelidikan penangkapan atau penyidikan maka harus di ketahui kasus posisi atau kronologi kasus tersebut sebagaimana di atur dalam hukum acara pidana (KUHP) pasal 18.³

[illegible]

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Baharudin

Pangkat / Nrp : Cleaning Service Hote CB Bontang

Tempat tanggal lahir : Ds. Kompote Kab Bone (Sulsel), 11 Juli 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Hotel CB di Jalan Letjen S.Parman Nomor 02 Rt.
08 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat.⁴

Dalam Undang-undang hukum acara pidana (KUHP) pasal 184 keterangan saksi termasuk bagian alat bukti untuk menentukan terdakwa dapat di jatuhi pidana.⁵

D. Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan

1- Bahwa Serma Totok Suharsoyo (Terdakwa) membenarkan pernyataan saksi diatas dan juga alat bukti yang di ajukan di persidangan

- 2 (dua) poket shabu-shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap/bong.
- 2 (dua) korek api gas.
- 2 (dua) potong sedotan berwarna putih.
- 1 (satu) lembar plastik berpelekat.
- 1 (satu) buah potongan sedotan.
- 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna biru merk texas chicken.⁶

⁴ Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor :05-K/Pm I-07/Ad/I/2012.

⁵ Karjadi m dan soesilo r *kitab undang-undang hukum acara pidana...*, 168

⁶ Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor :05-K/Pm I-07/Ad/I/2012.

Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh oditur militer dalam dakwaan yang di susun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

- Bahwa mengenai dakwaan tersebut majlis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang di maksud dengan “orang” adalah subyek hukum. Subyek hukum adalah orang / badan hukum yang dapat mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau di pidanakan. Yang di maksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barang siapa” ialah setiap orang yang tunduk dan dapat di pertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat di pertanggung jawabkan atas erbuatannya

secara melawan hukm. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI,AD.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka

Dengan demikian majlis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”.⁷

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan / perbuatan si pelaku/terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak di rumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil).

Namun dari kata-kata “ tanpa hak” dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau sipil) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang di maksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu(karena telah di tentukan oleh suatu aturan).kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang di maksudkan dengan “tanpa hak” berarti pada diri seseorang (si pelaku/terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas

- Menimbang: bahwa tujuan majelis hakim tidaklah semata-mata memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah pancasila dan sapta marga. Oleh karena itu sebelum majlis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan pidananya.

Laporan pengujian badan pom RI nomor:
PM.01.05.1011.11.11.0089 tanggal 7 november 2011.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

- 4- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

Demikian di putuskan pada hari ini rabu tanggal 07 maret 2012 dalam musyawarah majlis hakim oleh kolonel laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti,SH. M.Hum Nrp. 10537/P sebagai hakim ketua dan mayor chk edi purbanus, SH Nrp. 539835 serta mayor chk mulyono, SH Nrp. 522672, masing masing sebagai hakim anggota I dan sebagai hakim anggota II yang di ucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas, oditur militer mayor sus Andi Hermanto,SH. Nrp. 522871, panitera kapten chk Nurdin Raham,SH. Nrp.522551, di hadapan umum dan terdakwa.¹¹

¹¹ Ibid.